

ABSTRAK

Dalam hal terjadi pailit, pemenuhan hak negara dalam hal perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan sesuai dengan Pasal 1137 KUH Perdata. Mengacu pada ketentuan di atas, hak negara untuk menerima pembayaran atas utang pajak adalah diprioritaskan dan negara diposisikan sebagai kreditor preferen. UU Perpajakan memberikan perlakuan khusus dan posisi yang lebih tinggi di mana utang pajak adalah yang pertama harus dibayar oleh debitor dan diikuti oleh kreditor separatis. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur bahwa pemenuhan hak-hak buruh diutamakan dalam hal terjadi kepailitan. UU Ketenagakerjaan telah memprioritaskan pemenuhan upah dan hak-hak lainnya dari buruh dan memposisikan tenaga kerja sebagai kreditor yang diberi hak istimewa oleh hukum. Namun, tidak ada pengaturan dalam UU Ketenagakerjaan yang menyatakan posisi hak-hak buruh sebagai kreditor preferen lebih tinggi dari kreditor separatis dalam hal terjadi pailit, seperti yang diatur dalam UU Perpajakan bahwa hak negara lebih diutamakan dari kreditor separatis dalam hal pembayaran pajak. Dari perbedaan tersebut berarti bahwa posisi kreditor preferen buruh lebih rendah dari posisi kreditor separatis dalam pemenuhan utang jika terjadi kepailitan. Pengaturan yang menyatakan bahwa utang pajak memiliki hak untuk mendahului dari hutang lain juga kurang tepat. Terbitnya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 / PUU-XI / 2013 memberikan perubahan pada posisi hak-hak buruh dalam hal terjadi pailit.

Kata kunci: Kepailitan, Hutang Pajak, Hak Buruh

ABSTRACT

In the matter of bankruptcy, fulfillment of the right of the state within the matter of taxation is taking preference as been arranged under Law Number 16 of 2000 concerning General Provisions and the Procedures of Taxation as amended by Law Number 28 of 2007 and in accordance with Article 1137 of Civil Code. Referring from the provisions above, the right of the state to receive payment over the debt of taxation is a prioritized and the state is positioned as the preferred creditor. The Taxation Law gives a special treatment and higher position on which the tax debt is first to be paid by the debtor and followed by the right borne by the separatist creditor. On the other hand, Law Number 13 of 2003 concerning Employment also regulates that the fulfillment of the labor's rights in the matter of bankruptcy is preference. The Employment Law has prioritized the fulfillment of the wages and other rights of the labor and positioned the labor as preferred creditor on which the privilege is given by the law. However, there are no statements in the Employment Law that stated the position of labor as a preferred creditor is higher than the separatist creditor in the matter of bankrupt as what the Taxation Law expressed that the position of preferred creditor is higher than the separatist creditor within the matter of tax payment. That distinction seems positioned the preferred creditor status of labor is lower than the position of separatist creditor on the matter of right fulfillment in bankruptcy. It is certainty that the statement which stated that the collection of tax debts have the right to preceded than other debts does not fit in this matter. Eventually, there is a decision of Constitutional Court Number 67 / PUU-XI / 2013 that provides a change within the position on labor's right on the matter of bankruptcy.

Keywords: Bankruptcy, Tax Debt, Labor Rights